

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan salah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu upaya untuk mewujudkan swasembada pangan untuk memenuhi kebutuhan rakyat selalu menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional pada setiap era pemerintahan bangsa ini.

Masalah pangan adalah salah satu dari sekian banyak masalah yang dihadapi oleh negara ini sejak awal kemerdekaan bahkan hingga sekarang ini. Ketersediaan dan pemenuhan pangan selalu menjadi agenda penting dalam setiap kebijakan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, masalah pangan seperti beras selalu menjadi sorotan dan bahkan menjadi kebijakan prioritas setiap pemimpin negara ini. Sejarah bangsa ini telah membuktikan bagaimana sulitnya mengendalikan kebutuhan pangan.

Ada beberapa program pertanian yang dilaksanakan oleh beberapa pemimpin bangsa ini dalam mengatasi permasalahan pangan. Pada masa pemerintahan Soekarno atau pada saat demokrasi terpimpin ditetapkan kebijakan program padi sentra, yang bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan pangan khususnya beras. Program padi sentra dimulai dari tahun 1959 hingga 1963, yang bertujuan mencapai swasembada pangan. Namun, program ini gagal. Gagalnya

program ini terbukti dari ketidakmampuan pemerintah mengatasi kekurangan pangan khususnya beras pada saat itu. Pada tahun 1963 Presiden Soekarno memulai gerakan mengganti beras dengan jagung. Gerakan ini dicerminkan pada perubahan jatah kepada pegawai sipil dan militer yang semula memperoleh jatah beras, kemudian diubah menjadi jatah 25 persen jagung dan 75 persen beras. Program ini mengalami banyak kesulitan, sehingga kemudian dihentikan (Anne Boot & Peter McCawley, 1990:31).

Pada akhir pemerintahan orde lama, Indonesia mengalami kekurangan pangan. Oleh karena itu, pada saat pemerintahan orde baru, pemerintah berupaya untuk meningkatkan swasembada pangan. Pengalaman-pengalaman masa lampau memberikan banyak pelajaran mengenai cara-cara peningkatan produksi pangan. Orde baru yang muncul dengan pemimpinnya yaitu presiden Soeharto. Sebagai orang desa, Soeharto sangat memahami dan peduli untuk meningkatkan swasembada pangan. Sejak semula pemerintahan orde baru menyadari pentingnya persediaan pangan yang cukup. Soeharto banyak belajar dari pendahulunya Soekarno yang kemudian dijadikan pedoman untuk mengatasi kekurangan pangan.

Pemerintahan orde baru membuat terobosan baru, dengan membuat perubahan yang cepat di bidang pangan agar kebutuhan rakyat dapat terpenuhi.

Pemerintahan orde baru menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan swasembada pangan. Kebijakan pemerintah tersebut dituangkan dalam program yang dikenal dengan nama REPELITA atau Rencana Pembangunan Lima Tahun (Lerisa dkk,2012:99).

Arah dan kebijakan yang dijalankan orde baru pada awalnya diarahkan untuk pembangunan pertanian. Pelaksanaan pembangunan pemerintahan orde baru diimplementasikan kedalam suatu program pembangunan jangka panjang yang disebut dengan rencana pembangunan lima tahun (Repelita). Repelita dibagi dalam beberapa periode yang jangka waktunya 5 tahun. Salah satu kebijakan dalam repelita 1 tersebut adalah kebijakan dalam bidang pertanian yang dikenal dengan *revolusi hijau*.

Pelaksanaan revolusi hijau yang pernah melahirkan swasembada pangan beras pada tahun 1984 hingga 1989, ternyata tidak diikuti dengan pelestarian pangan yang berkelanjutan pada jenis-jenis pangan lokal yang lain. Jenis-jenis pangan lokal yang lebih dulu memasyarakat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia perlahan hilang digantikan dengan beras sebagai makanan pokok utama di seluruh Indonesia.

Revolusi hijau memang mampu mendongkrak produktivitas pertanian tanaman pangan khususnya beras, sehingga Indonesia pada kurun waktu tertentu telah mampu mencapai swasembada pangan, khususnya beras. Namun, kebijakan revolusi hijau yang dilakukan pemerintahan orde baru telah membuat masyarakat Indonesia melupakan jenis-jenis pangan lokal. Banyak pengetahuan lokal yang menyangkut pertanian dan pangan lokal telah banyak dilupakan oleh kaum tani. Hilangnya jenis pangan lokal masyarakat ini diakibatkan karena revolusi hijau hanya berfokus pada peningkatan salah satu jenis pangan yaitu beras sehingga menghilangkan secara perlahan berbagai jenis pangan lokal (Soetrisno,1998:14).

Salah satu daerah yang mengalami dampak kebijakan revolusi hijau adalah di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebelum dilaksanakan revolusi hijau, masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah sudah mengenal berbagai jenis pangan lokal. Namun, setelah pelaksanaan revolusi hijau pada masa pemerintahan orde baru masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah menjadikan beras menjadi satu-satunya sumber pangan. Akibatnya, berbagai jenis pangan lokal masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah terlupakan. Adapun jenis pangan lokal yang terlupakan, antara lain: sagu dan umbi-umbian. Hal ini membawa dampak negatif pada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah, saat produksi beras menurun. Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah yang sudah terbiasa mengkonsumsi beras sebagai satu-satunya makanan pokok, sangat rentan pada kekurangan pangan.

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti dalam hal ini menganggap penting mengadakan penelitian sejarah dengan mengangkat topik kajian sejarah, dampak kebijakan revolusi hijau pada masa orde baru terhadap hilangnya pangan lokal dengan judul yaitu “Dampak Kebijakan Revolusi Hijau Pemerintahan Orde Baru di Kabupaten Tapanuli Tengah 1969-1998”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah penting yang harus diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Adanya permasalahan pangan, yang dialami bangsa Indonesia di akhir pemerintahan orde lama hingga pada awal pemerintahan orde baru.
2. Pemerintahan orde baru melaksanakan kebijakan revolusi untuk mengatasi masalah pangan.
3. Kebijakan revolusi hijau mempunyai dampak yang sangat besar terhadap bangsa Indonesia.
4. Kebijakan revolusi hijau pada masa pemerintahan orde baru hanya berfokus pada peningkatan salah satu jenis pangan yaitu beras.
5. Kebijakan revolusi hijau pada masa pemerintahan orde baru telah berhasil membuat bangsa Indonesia swasembada pangan beras pada tahun 1984 hingga tahun 1990.
6. Kebijakan revolusi hijau yang berfokus pada peningkatan produktivitas beras, membuat bangsa Indonesia menjadi ketergantungan pada salah satu jenis pangan yaitu beras.
7. Kebijakan revolusi mempunyai dampak terhadap rakyat di wilayah Indonesia, salah satunya di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

1.3. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi perluasan pembahasan yang tidak diinginkan dalam penelitian yang akan dilaksanakan, maka penulis membuat batasan masalah yang akan diteliti agar penelitian lebih terfokus dan tidak melebar. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah dampak kebijakan revolusi hijau pada masa

pemerintahan orde baru terhadap pangan lokal yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah 1969-1998.

1.4. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka terdapat beberapa masalah yang akan diteliti oleh calon peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa pemerintahan Orde Baru melaksanakan kebijakan revolusi hijau?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan kebijakan revolusi hijau pemerintahan Orde Baru di Kabupaten Tapanuli Tengah?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan kebijakan revolusi hijau pemerintahan Orde Baru di Kabupaten Tapanuli Tengah?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan calon peneliti mengangkat permasalahan pengaruh kebijakan revolusi hijau pemerintahan orde baru di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah berikut:

1. Mengetahui latar belakang munculnya kebijakan revolusi hijau pada masa pemerintahan Orde Baru.
2. Menganalisis bentuk pelaksanaan kebijakan revolusi hijau di Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Menganalisis dampak pelaksanaan kebijakan revolusi hijau pada masa pemerintahan Orde Baru di Kabupaten Tapanuli Tengah.

1.6. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang akan dilaksanakan, diharapkan mampu memberikan manfaat kepada peneliti dan para pembaca khalayak umum.

Manfaat yang diharapkan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan.
- b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sejarah nasional bagi peneliti dan pembaca, terkhusus mengenai sejarah kebijakan revolusi hijau pemerintahan orde baru dan juga dampak yang ditimbulkannya terhadap bangsa.
- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada civitas akademi khususnya mahasiswa pendidikan sejarah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai revolusi hijau pada masa pemerintahan orde baru.

THE
Character Building
UNIVERSITY